

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan lembaga peningkatan perekonomian lokal dengan berbagai macam potensi. Peningkatan potensi ini memiliki tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat melalui pengembangan perekonomian mereka. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa. (Ridlwani, 2015). Dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan perubahan bagi bidang sosial maupun bidang ekonomi desa itu sendiri. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi (Anggraeni, 2016). Menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tujuannya guna menampung kegiatan ekonomi untuk masyarakat desa dan diharapkan adanya kerjasama antar desa. Menggerakkan perekonomian desa akan lebih mudah jika dengan cara mengembangkan potensi yang ada di desa atau mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat desa itu sendiri (Susilo and Purnamasari, n.d.). Dalam perspektif pedesaan dengan hubungan perkotaan, prinsip terpenting adalah memanfaatkan sumber daya ekonomi dan mempromosikan kegiatan ekonomi pedesaan secara

maksimal di desa melalui peningkatan kegiatan ekonomi bernilai tambah (Hardijono et al., 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan laporan keuangan untuk memberikan informasi suatu entitas sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Tambuak and Moridu, n.d.). Suatu siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran, selanjutnya pelaksanaan dan penausahaan dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga akan menghasilkan laporan akhir (Nugrahaningsih et al., 2016). Dalam operasionalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala oleh modal. Pada saat ini hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu kondisi desa yang sangat minim anggaran untuk dijadikan modal. (Ramadana and Ribawanto, n.d.).

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, untuk meningkatkan perekonomian beberapa desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satunya yaitu Desa Karangkamulyan, di desa ini terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “BUMDes Ciungwanara” yang beralamat di Jl. Raya Ciamis-Banjar Dusun Cibeka Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangkamulyan memiliki wilayah kerja meliputi Desa Karangkamulyan dan memiliki program kerja bantuan

pangan non tunai, usaha sembako, usaha jual beli beras, dan usaha pengoperasian mesin molen.

Permasalahan internal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangkamulyan yaitu masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Hal ini disebabkan karena pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Salah satu indikator untuk mampu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dalam pelaporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini akuntansi harus berperan sebagai alat bantu untuk menginformasikan bahwa laporan keuangan itu sangat penting bagi kemajuan usaha. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan BUMDes (Dwidiyantini, 2017). Sistem akuntansi yang memadai dalam menyusun laporan keuangan antara lain meliputi penyusunan kode akun, nama akun, buku jurnal umum, buku kas, buku bank, buku piutang, buku barang, dan neraca saldo. Dalam proses menyusun laporan keuangan juga perlu menentukan kebijakan akuntansi yang dianut (Atikah et al., 2019). Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, berkompeten dan harus dikelola secara transparan sehingga menjadi sarana efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa setempat. Transparan meliputi

keterbukaan pengelolaan BUMDes yang dapat terpantau oleh Kepala Desa atau masyarakat pada umumnya (Hernawan and Dewi, n.d.). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini harus terus dikembangkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi ujung tombak dalam penggunaan anggaran dana desa. Melalui anggaran dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa membuat program yang bisa meningkatkan perekonomian di desa tersebut. (Eko Putro Sandjojo, [Republika.co.id](http://Republika.co.id), 29 April, 2019). Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun (Koso et al., 2018).

Dalam penelitian (Rudini et al., 2016) meneliti yang berjudul Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin menjelaskan bahwa pencatatan transaksi atau pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Di Desa Langkitin hanya menyajikan laporan keuangan dua jenis yaitu laporan laba rugi dan neraca. Dalam penelitian (Irawati and Martanti, 2017) meneliti mengenai transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa, mengatakan bahwa laporan keuangan membantu suatu instansi atau organisasi dalam pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Begitu juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu membutuhkan

laporan keuangan untuk mengetahui perkembangannya selama periode tertentu.

Faktor utama dari sebuah usaha atau organisasi yaitu sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki tersebut akan menentukan berhasilnya sebuah organisasi atau usaha (Ismadewi et al., 2017). Kinerja adalah tentang apa yang seseorang dikerjakan dan bagaimana proses mengerjaannya (Usaha et al., n.d.). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, dan Kepala Unit Usaha. Dalam menciptakan akuntabilitas keuangan desa maka pemerintah desa harus mentaati aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Nafidah and Anisa, 2017).

Permasalahan yang selanjutnya dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah minimnya pengetahuan pengelola untuk menjalankan usaha sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti kurangnya pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar keuangan. sehingga kinerja kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan usaha kurang optimal. Dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa minim sehingga tidak mengetahui betapa pentingnya membentuk kelompok usaha (Agunggunanto et al., n.d.). masalah ekonomi desa perlu diselesaikan dengan penanganan menyeluruh, agar menjadi peluang bisnis untuk mensejahterakan masyarakat (Setyobakti, 2017).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Dan Allah SWT berfirman dalam surat An-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Penyusunan Laporan Keuangan dan Penilaian Kinerja Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di BUMDes Ciungwanara Karangkamulyan Ciamis)”**

Penelitian ini replikasi dan pengembangan dari penelitian Rudini, Nurhayati, dan Afriyanto (2016) dengan perbedaannya penelitian tersebut menjelaskan hanya membahas mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu saja, sedangkan penelitian ini menjelaskan

mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan dan penilaian kinerjanya di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciungwanara Ciamis.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dengan adanya batasan masalah mempermudah peneliti dalam pembahasan dan agar lebih terarah sehingga tujuan penelitian tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Lingkup pembahasan meliputi penyusunan pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Penilaian kinerja pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciungwanara Karangkamulyan ?
2. Bagaimana kemungkinan untuk mengimplementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciungwanara Karangkamulyan dan permasalahan yang ada?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan prosedur penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciungwanara Karangkamulyan

2. Untuk menelaah kemungkinan mengimplementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciungwanara Karangkamulyan dan permasalahan yang ada.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan penambahan ilmu bagi pihak-pihak yang terkait oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat setempat.
2. Secara praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengawasi dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - b. Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelola dapat menambah wawasan untuk mengembangkan usaha tersebut, terutama dalam membuat laporan keuangan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang pentingnya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



guna meningkatkan perekonomian desa dan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam usahanya tersebut.